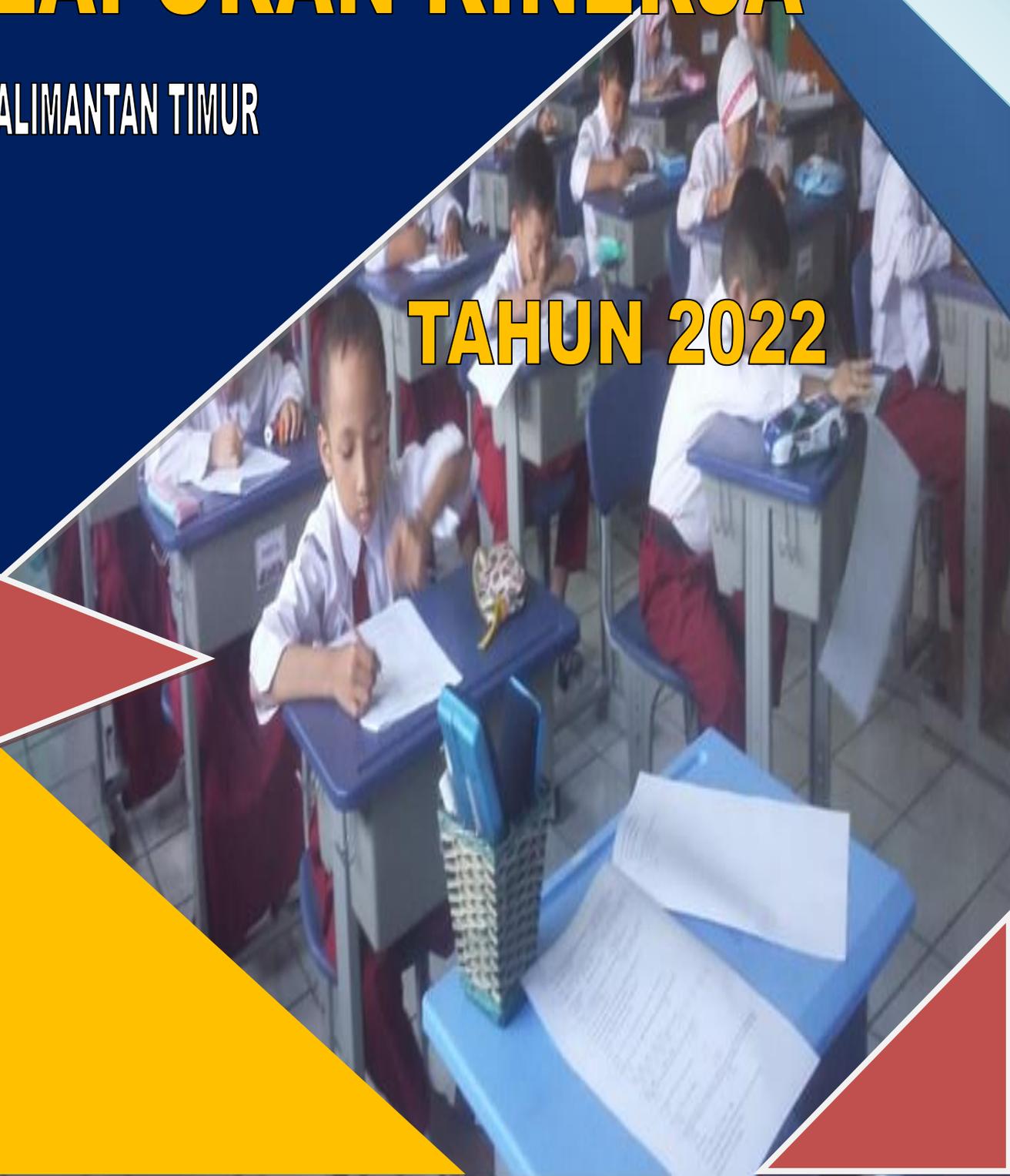




# LAPORAN KINERJA

BPMP KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur pada tahun 2022.

Samarinda, 29 Desember 2022

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,



Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd.

Nip197002011997021001

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>ii</b>
<b>Ringkasan Eksekutif .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi.....	3
D. Isu Strategis.....	4
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b> <b>.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>16</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran .....	31
<b>BAB IV – PENUTUP .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- Pengukuran Kinerja Tahun 2022	
- Capaian Kinerja Sasaran (Output) Tahun 2022	
- Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2022	
- Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2022	
- Perjanjian Kinerja Akhir 2022	
- Pernyataan Telah Direviu	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen.

#### 1.1. Indikator kinerja Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.

Pada tahun 2022 Indikator 1.1 merupakan indikator yang baru muncul di BPMP dan pada tahun 2021 indikator ini belum ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP. Hal ini disebabkan karena pada pertengahan tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dan telah terjadi pergeseran kewenangan yang mana jenjang PAUD sebelumnya menjadi kewenangan UPT BP PAUD berubah menjadi kewenangan BPMP. Perubahan nomenklatur ini menyebabkan terjadi pula cut oof anggaran sehingga ketercapaian Indikator ini diperoleh hasilnya dari pusat yakni dari eselon 1 (Ditjen PAUD, Dikdasmen melalui BAN Pusat), dengan mengacu pada data hasil akreditasi sekolah, karena hasil assesmen belum dapat diakses dan belum ada hasilnya diperoleh dari Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan (BSKAP). Mutu pembelajaran satuan pendidikan di samping dapat diukur melalui hasil assesmen nasional juga dapat diukur melalui hasil akreditasi sekolah melalui sistem yang terintegrasi dengan DAPODIK, EMIS, PMP atau sistem lain yang tersedia yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. Disamping itu penilaian akreditasi adalah merupakan penilaian proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan.

Adapun hasil mutu pembelajaran PAUD berdasarkan hasil akreditasi satuan pendidikan sebagai berikut:

Realisasi (%) 2021	Tahun 2022			Target Renstra 2022	Capaian Terhadap target akhir Renstra 2024
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
12.73	0.98 %	17.98%	5.25 %	0.98 %	1.33 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 hasil mutu pembelajaran PAUD yang bersumber dari data akreditasi sekolah diperoleh capaian sebesar 12.73% sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 17.98%. Jadi persentase peningkatan mutu pembelajaran PAUD di Propinsi Kalimantan Timur diperoleh capaian 5.25%. Hasil ini berada di atas

dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dengan proses penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 SNP yang diterapkan di satuan pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

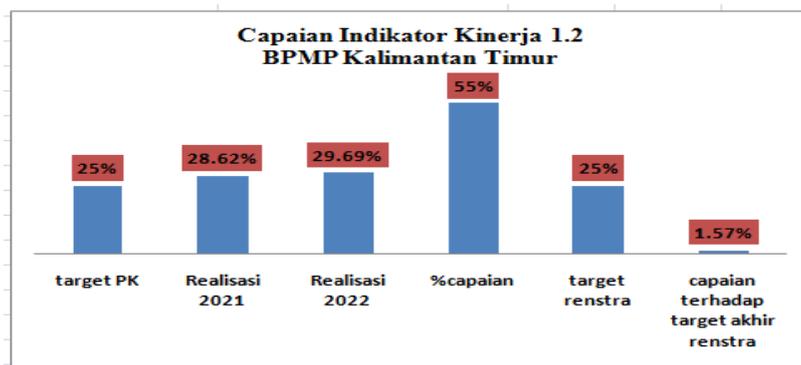
Jika capaian ini diperbandingkan dengan target akhir renstra 2024 diperoleh peningkatan hasil sebesar 1.33 %. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni 3.92 %. Adapun grafik capaian dari indikator ini sebagai berikut:



## 1.2. Indikator Kinerja Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Ketercapaian indikator 1.2 ini, diperoleh dari hasil akreditasi sekolah karena peningkatan rapor pendidikan dan mutu pendidikan disamping dapat diukur melalui assesmen nasional juga dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah. Hasil peningkatan mutu pendidikan/peningkatan rapor pendidikan ini diperoleh dari pusat (BAN S/M melalui Ditjen Paud Dikdasmen). Adapun hasil dari peningkatan rapor pendidikan yang bersumber dari data akreditasi sekolah sebagai berikut:

Realisasi (%) 2021	Tahun 2022			Target Renstra 2022	Capaian Terhadap target akhir Renstra 2024
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
28.62 %	25 %	29.69%	55 %	25%	1.57 %



Berdasarkan data di atas, target kinerja indikator kinerja 1.2 tahun 2022 adalah 25% dimana pada tahun 2021 terealisasi 28.62% sedangkan pada tahun 2022 ini terealisasi 29.69%. Persentase capaian kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya adalah sebesar 55% terdiri atas 5 kabupaten/kota dan 1 propinsi dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan capaian terhadap target akhir renstra juga mengalami kenaikan sebesar 1.57%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan adanya kenaikan nilai akreditasi satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota karena penilaian akreditasi ini melalui sistem yang terintegrasi dengan DAPODIK, EMIS, PMP atau sistem lain yang tersedia yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. Disamping itu penilaian akreditasi adalah merupakan penilaian proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan.

Untuk mencapai kedua indikator kinerja di atas, banyak hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target indikator kinerja antara lain:

1. terjadi perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dan telah terjadi pergeseran kewenangan yang mana jenjang PAUD sebelumnya menjadi kewenangan UPT BP PAUD berubah menjadi kewenangan BPMP, Hal ini menyebabkan hasil capaian indikator ini belum dapat diakses melalui sistem aplikasi rapor pendidikan.
2. Sistem informasi capaian rapor pendidikan satuan pendidikan dan rapor pendidikan kabupaten/kota tidak dapat diakses oleh BPMP, sehingga BPMP mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dan advokasi ke kabupaten/kota.
3. Hasil assessmen nasional tahun 2022 belum dapat diakses, sehingga indikator kinerja sulit diukur ketercapaiannya karena belum ada angka pembandingnya.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:

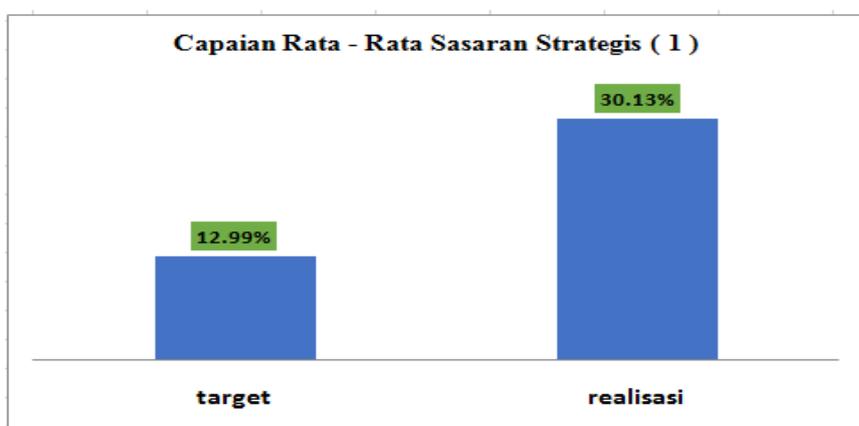
1. Koordinasi secara eksternal dengan pusat yakni bagian evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen, untuk mendapatkan data hasil mutu pembelajaran PAUD dan persentase kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya dari Badan Akreditasi Nasional.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ANBK dan pelaksanaan Perencanaan berbasis data di satuan pendidikan serta melakukan advokasi kepada

pemerintah daerah/dinas kabupaten/kota dalam upaya peningkatan rapor pendidikan satuan pendidikan, kabupaten kota dan propinsi.

3. Cara yang ditempuh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani indikator kinerja yang sulit diukur adalah berkoordinasi dengan pusat yakni BAN Paud dan BAN S/M melalui Ditjen PAUD Dikdasmen untuk mendapatkan capaian indikator 1.1 dan 1.2

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-1 pada sasaran strategis Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai berikut:

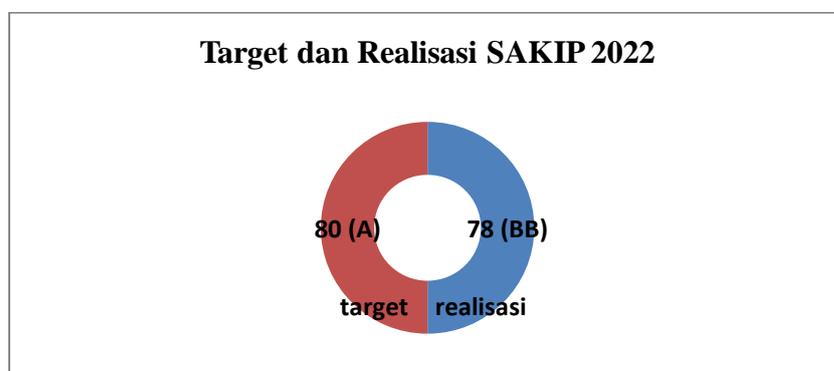
Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-1 pada sasaran strategis Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai berikut:



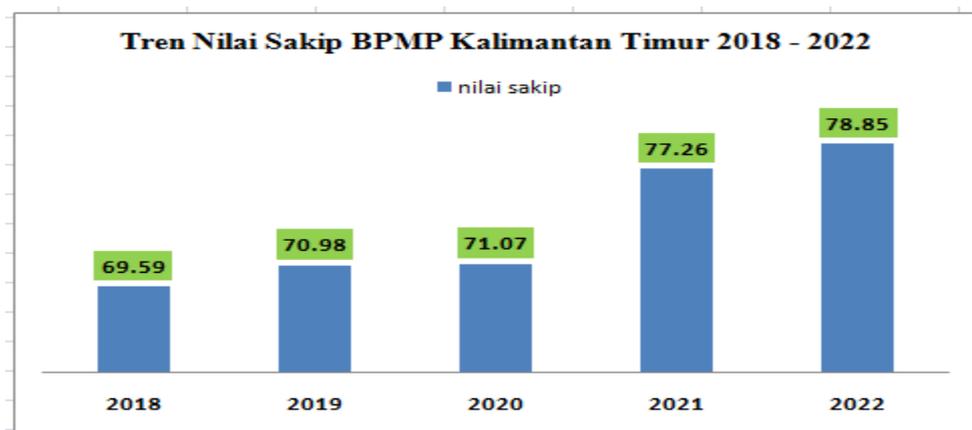
2. Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur dicapai dari indikator kinerja sebagai berikut:

### 2.1. Indikator kinerja Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Target dan Realisasi nilai sakip BPMP Kalimantan Timur 2022:



Tren nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun :



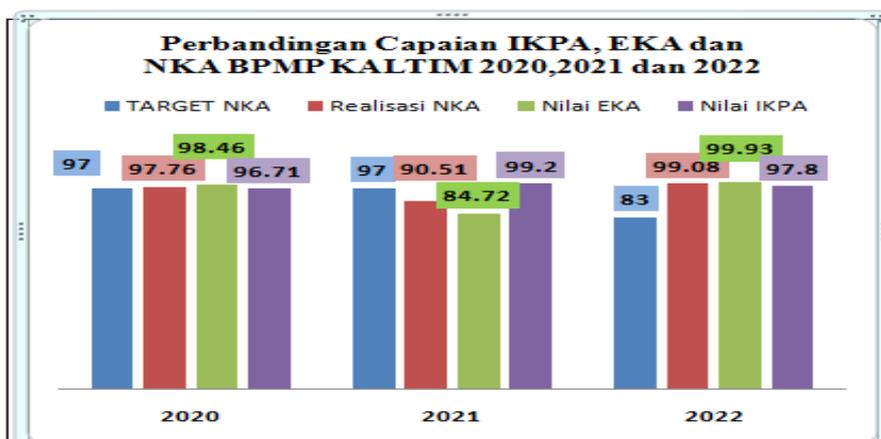
## 2.2. Indikator kinerja Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL

Berikut disajikan tabel Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik
2022	83	99.93	97.80	99.08	Sangat Baik

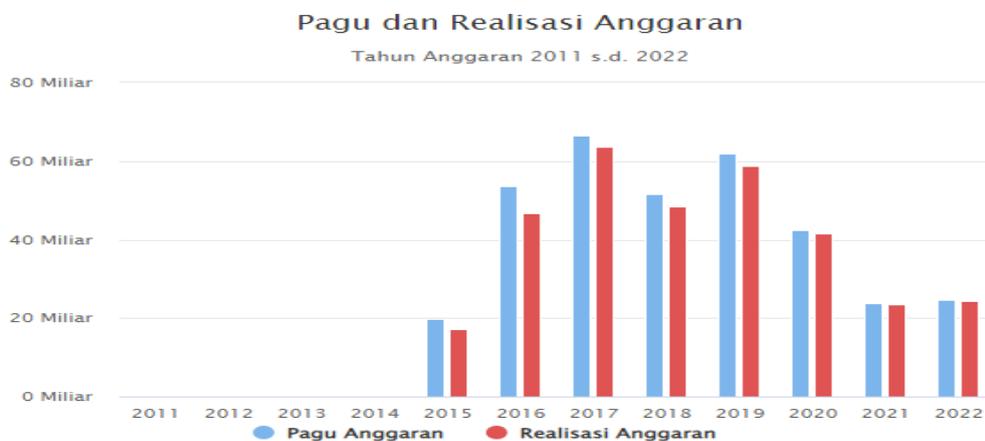
Sumber:Aplikasi Spasikita(simproka) per tanggal 10 Januari 2023

Adapun grafik Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2020 dan 2021, 2022 sebagai berikut:



Pada tahun 2022 ini, terjadi perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dan juga terjadi perubahan indikator kinerja sehingga dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian target kinerja renstra BPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan

unit eselon 1. Hal ini terjadi karena seiring dengan adanya rewiu RENSTRA Kemendikbudristek, dan juga pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi covid dan tentunya berdampak pada pagu dan nilai kinerja anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi. Adapun pagu anggaran yang di kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut:



## PRESTASI

1. Satuan Kerja dengan Transaksi Terbesar Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020
2. Satuan Kerja Pengelola Belanja Modal Pagu Besar Terbaik T.A 2020
3. Peringkat Kedua IKPA Terbaik Kategori Satker Besar Tahun 2020
4. Unit Layanan Terpadu di Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Prediksi "Baik dengan Catatan" Tahun 2020
5. Satuan Kerja Dengan Kinerja Terbaik dalam Kategori Penyampaian Kontrak Tahun 2020
6. Peringkat Tiga Satuan Kerja dengan Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 dengan nilai sebesar 98,96

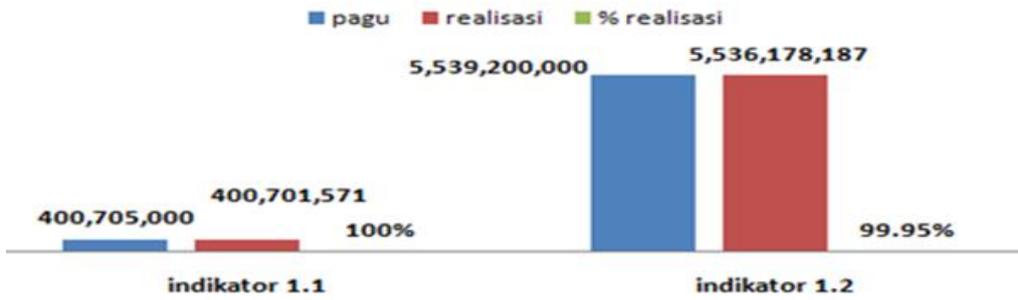


Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-KL BPMP Provinsi Kalimantan Timur perlu proses penjaminan mutu internal yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kinerja lembaga.

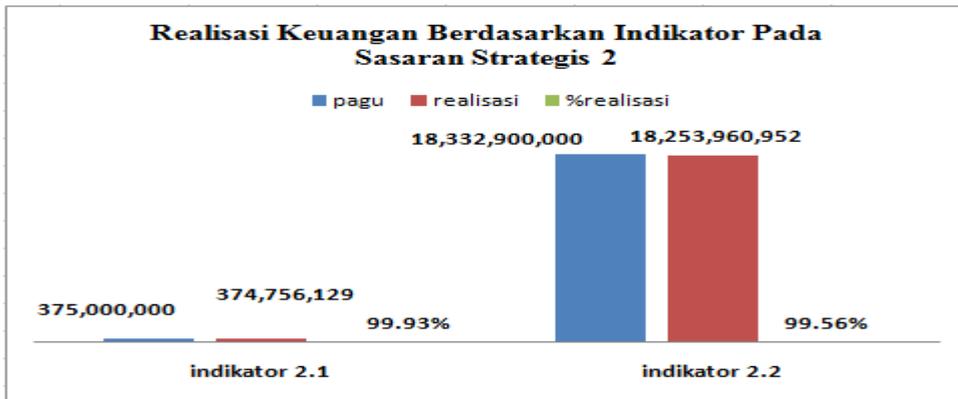
Kedua sasaran strategis di atas dicapai melalui dukungan anggaran yang memadai, dengan serapan anggaran tahun 2022 sebesar 99.67% setara dengan Rp24.565.596.839 dari pagu anggaran berdasarkan revisi terakhir Rp24.647.805.000. Pengukuran evaluasi proses pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan aplikasi online simproka yang dikembangkan oleh biro PKLN Kemendikbudristek diperoleh nilai 99.08 atau termasuk kategori "Sangat Baik".

Capaian realisasi Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator yang ada dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 sebagai berikut:

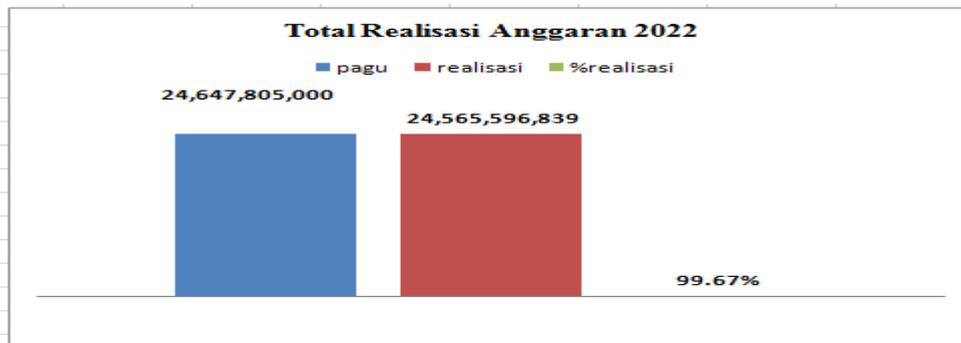
**Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Pada Sasaran Strategis 1**



**Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Pada Sasaran Strategis 2**



Sedangkan total capaian realisasi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 sebagai berikut:



Capaian Realisasi Anggaran 2022 BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Perhitungan nilai efisiensi RO satuan kerja menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

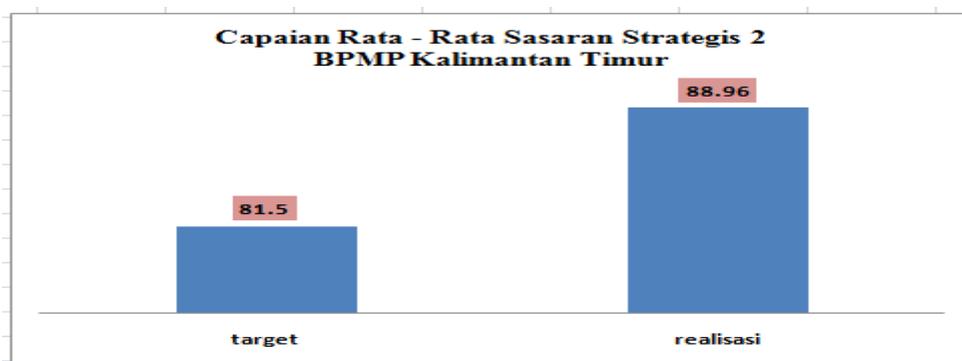
Sumber : Permenkeu RI No.249/PMK.02/2011

Efisiensi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang diperoleh dari aplikasi simproka dan aplikasi smart pertanggal 6 januari 2023 sebesar 20 %, dengan nilai efisiensi RO sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran dimana BPMP Provinsi KALTIM telah merealisasikan capaian fisik melebihi dari target output dengan anggaran yang terbatas dapat melakukan berbagai kegiatan dan menambah realisasi output baik secara daring maupun luring. Efisiensi anggaran ini ditempuh dengan cara melakukan refocusing anggaran yakni memindahkan alokasi anggaran untuk kegiatan yang prioritas dalam upaya peningkatan rapor pendidikan. Efektivitas penganggaran ini berdasar pada 3 prinsip yakni prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja barang, yang meliputi :

- a. optimalisasi kegiatan perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, belanja bahan, belanja operasional non operasional lainnya.
- b. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring

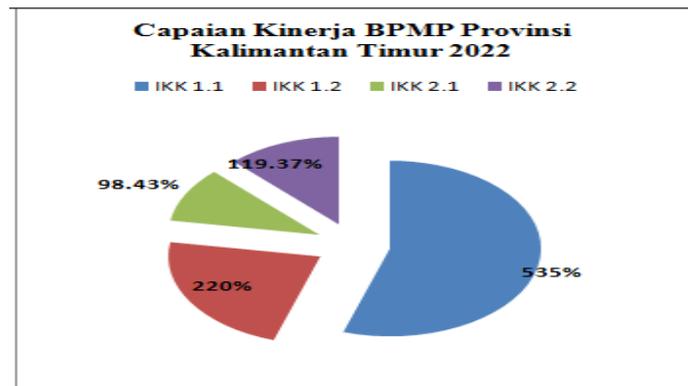
Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatkan tata kelola BPMP sebagai berikut:



Berikut disajikan secara umum tabel tentang pengukuran kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Indikator	Target	Realisasi
(1.1) Persentase Satuan Pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98%	5.25%
(1.2) Persentase propinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor	25%	55%
(2.1) Predikat SAKIP BPMP Kalimantan Timur	(80) A	( 78.85) BB
(2.2) Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL BPMP Kaltim	83	99.09

Dari tabel hasil pengukuran kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur, secara umum menunjukkan hasil dengan kategori “SANGAT BAIK”. dengan capaian rata-rata dari 4 indikator kinerja sasaran sebesar 59.54, nilai ini berada di atas dari target yang seharusnya yakni 47,24 atau dapat dikatakan bahwa capaian dari 4 indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah 3 indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100% dan 1 indikator yang kurang dari 100%. Adapun grafik sebagai berikut:



Hambatan dalam pencapaian target perjanjian kinerja adalah adanya keterbatasan SDM BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan SAKIP di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah menambah SDM SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP, serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program dan anggaran dalam bentuk evaluasi program dan pemantauan realisasi anggaran atas capaian program untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan.

Melalui laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk meminimalisir resiko terhadap pencapaian tujuan sasaran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur di tahun selanjutnya.

# PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum



Gambar. Gedung utama BPMP Kalimantan Timur

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur pertama kali dibentuk pada tanggal 2 Mei 1991 dengan nama Balai Penataran Guru (BPG) melalui SK Mendikbud Nomor 0240a/O/1991, dengan tugas dan fungsi sebagai Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Guru di provinsi bertanggung jawab langsung pada Direktorat Tenaga Kependidikan yang berada di bawah lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan Nasional memunculkan peraturan dan kebijakan untuk merefungsionalisasi dan merestrukturisasi BPG menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) yang tertuang pada SK Mendiknas Nomor 087/O/2003 tanggal 4 Juli 2003, yang selanjutnya rincian tugas LPMP diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/O/2004, tanggal 14 Mei 2004. LPMP mempunyai tugas sebagai penjamin mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. Sesuai Permendiknas Nomor 31 Tahun 2005 disebutkan bahwa LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Tanggal 13 Februari 2007, dengan berdasarkan pada Kepmendiknas Nomor 7 Tahun 2007, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan difungsionalisasi menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan maksud untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tahun 2010 LPMP berada di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (Badan PSDMP dan PMP). Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 dalam Pasal 1 disebutkan bahwa LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 berdasarkan permendikbudristek nomor 11 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP

Kalimantan Timur telah berubah nama menjadi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur dipimpin oleh Dr.Khairullah, S.Pd, M.Pd dengan jumlah SDM sebanyak 65 PNS. Wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur melingkupi:

### Susunan Kelompok Kerja pada BPMP/BBPMP

- **Pokja Komunikasi, Kemitraan dan Pemberdayaan**  
(melihat secara dekat per propinsi, per kabupaten/kota)
  - Kemitraan dengan Pemerintah Daerah
  - Mitra Pembangunan & Organisasi Masyarakat Sipil
  - Strategi Komunikasi & Publikasi
- **Pokja Inovasi dan Transformasi Pembelajaran**  
(program-program prioritas Merdeka Belajar)
  - Program Sekolah Penggerak
  - Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dengan jalur Mandiri
  - Transformasi Digital (akun belajar.id, Platform Merdeka Mengajar)
  - dst. (program-program prioritas Merdeka Belajar lainnya)
- **Pokja Data, Perencanaan, dan Penjaminan Mutu**  
(tindak lanjut hasil AN untuk peningkatan mutu)
  - Rapor Pendidikan
  - Perencanaan Berbasis Data (perencanaan pendidikan per daerah, perencanaan pendidikan per sekolah)
- **Pokja Tata Kelola Satuan Pendidikan**  
(pelaksanaan regulasi, BOS/BOP, SIPLah, sarana prasarana, dll)
  - Tata Kelola PAUD
  - Tata Kelola SD
  - Tata Kelola SMP
  - Tata Kelola SMA
  - Tata Kelola SMK (dengan Ditjen DIKSI, bisa remote)
  - Tata Kelola SLB
  - Tata Kelola Pendidikan Non Formal

## SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)



Adapun jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:



Sedangkan gambaran SDM BPMP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan

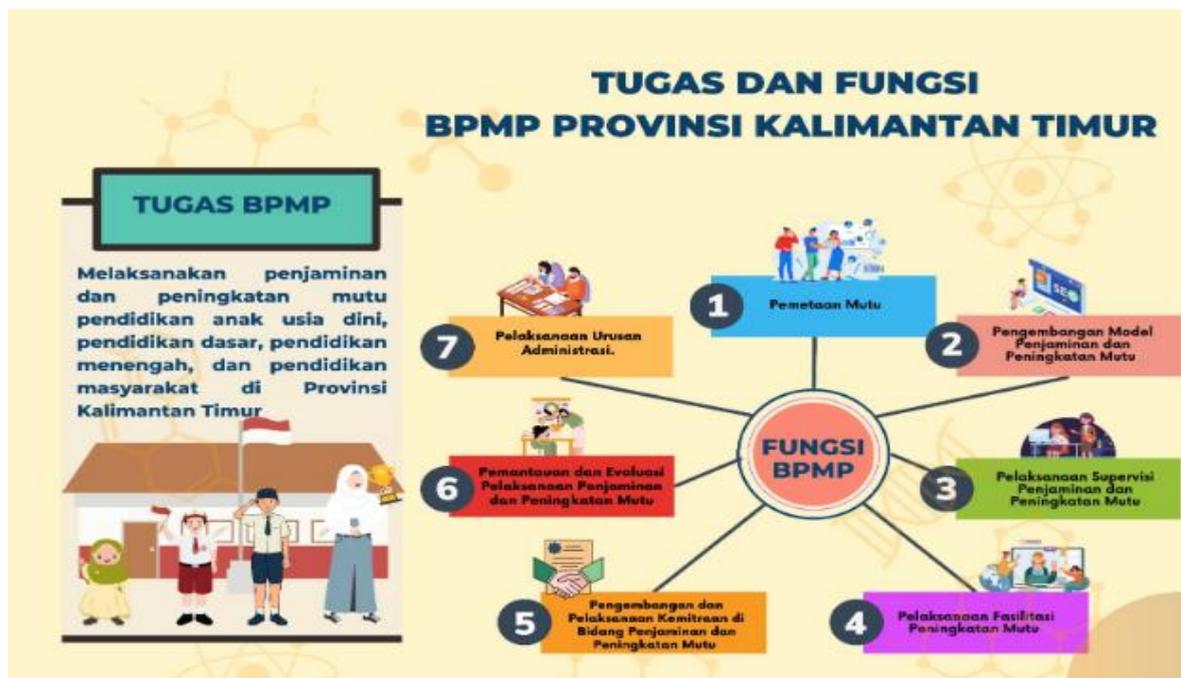


## B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;

## C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



## Struktur Organisasi:

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022, struktur organisasi BPMP adalah sebagai berikut:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Umum;
- c) Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagan 1.1 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Timur  
(Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 )**



## D. Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

### 1. Isu Strategis BPMP Kalimantan Timur

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, permasalahan utama/tantangan yang dihadapi BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan fungsi strategisnya dalam hal peningkatan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kompetensi literasi dan numerasi dan pendidikan karakter siswa

*Literasi* dan *numerasi* merupakan kompetensi dasar yang penting bagisiswa. *Literasi* atau *numerasi* sendiri adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau menggunakan angka-angka. Kemampuan literasi, terutama numerasi siswa di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun literasi dan numerasi tidak identik dengan pelajaran bahasa Indonesia dan Matematika. Namun setidaknya hanya dua pelajaran itu yang paling dekat digunakan untuk menggambarkan kompetensi bidang *literasi* dan *numerasi* siswa saat ini.

# Hasil PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah



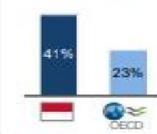
## 1. Tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar dan menengah

### Skor PISA dan Peringkat (#, 2000-2018)



- Konsisten sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah
- Skor PISA yang stagnan dalam 10-15 tahun terakhir
- Namun demikian, selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat

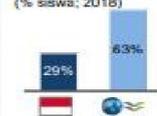
### Perundungan (% siswa; 2018)



41% siswa Indonesia dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan (vs. 23% rata-rata OECD)

Siswa yang sering mengalami perundungan memiliki skor 21 poin lebih rendah dalam membaca, merasa sedih, ketakutan, dan kurang puas dengan hidupnya. Mereka juga memiliki kecenderungan membolos sekolah

### Pola pikir untuk berkembang (% siswa; 2018)



Hanya 29% siswa Indonesia setuju bahwa 'kepandai-an adalah sesuatu yang bisa berubah banyak' (vs. 63% rata-rata OECD)

Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius, menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting

## 2. Peningkatan jumlah sekolah yang mencapai kategori SNP

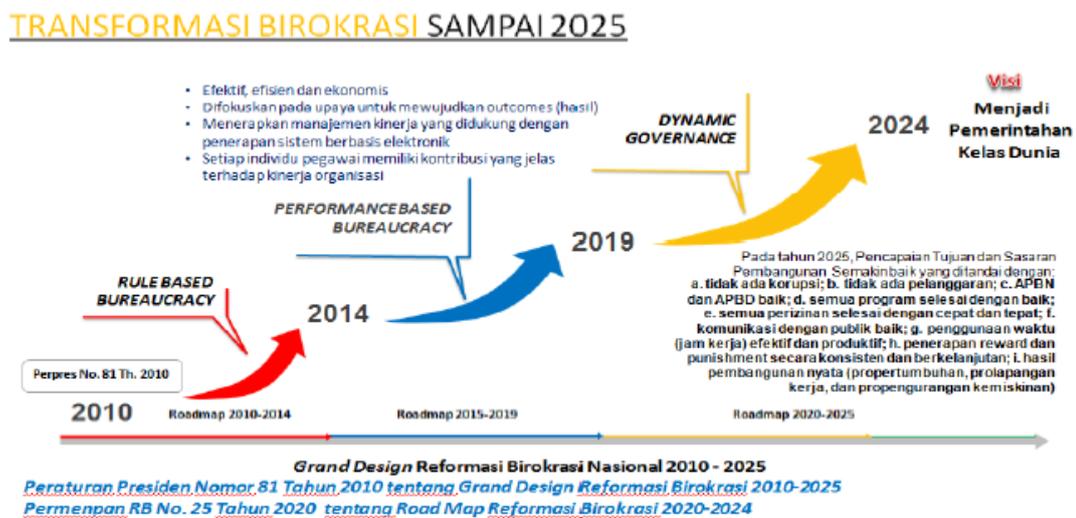
Berdasarkan capaian rapor mutu tahun 2019 dan rapor pendidikan tahun 2021 terlihat masih rendahnya sekolah sekolah dengan capaian “SNP” dan masih rendahnya mutu pendidikan sekolah yang diperoleh melalui hasil assessment nasional. Hal ini menjadi tantangan untuk dapat terus di tingkatkan melalui pelaksanaan program di 2020 -2024.

Jenjang	Jumlah	SNP	%
SD	1652	269	16,28
SMP	440	135	30,68
SMA	142	47	33,09
Total	2.234	451	20.18

## 3. Tata kelola dan pelayanan organisasi perlu di tingkatkan terus kualitasnya.

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025, yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan birokrasi pemerintah yang professional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Birokrasi seperti itu diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan, dan pembangunan nasional serta daerah. Tujuan reformasi birokrasi di atas adalah dalam rangka mengejar visi reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut dibutuhkan sistem manajemen pemerintahan dan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Oleh karena itu pemerintah telah menetapkan kebijakan

untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, tujuan ini tertuangkan dalam sebuah grand design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025 sebagai berikut :



#### 4. Kualitas data pokok pendidikan masih terus di tingkatkan

Data pokok Pendidikan (Dapodik) yang didalamnya terkandung data peserta didik, data pendidik dan tenaga kependidikan, data substansi Pendidikan dan data sarana prasarana merupakan yang berguna sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan yang tepat. Kualitas Dapodik ditentukan oleh tiga indikator yaitu akurat, berkelanjutan dan terbaru. Sesuai data rapor mutu Dapodik jenjang pendidikan dasar dan menengah yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, kualitas Dapodik belum mencapai 100%. Untuk itu pemerintah mendorong semua sekolah melalui pemerintah daerah untuk melakukan input data secara akurat (wajar dan benar), valid, akuntabel dan up to date serta melakukan sinkronisasi secara berkelanjutan, melakukan pemutakhiran data secara berkala. Data dapodik ini dalam dunia pendidikan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program program pendidikan nasional dan data dapodik ini juga telah diintegrasikan dengan data hasil assessment nasional melalui aplikasi rapor pendidikan untuk mengetahui mutu pendidikan satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

## 2. Peran Strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon II, BPMP Provinsi Kalimantan Timur mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam

tata Kelola kelembagaan. Peran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:

1. Bersama sama pemerintah daerah berupaya dalam pemenuhan 8 SNP dan peningkatan mutu pendidikan di semua satuan pendidikan.
2. Bersama sama pemerintah daerah berupaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan
3. Mengawal kebijakan Kemendikbud Ristek Dikti dalam implementasi di daerah sehingga berjalan sukses.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



### VISI DAN MISI

#### VISI

Terbentuknya insan serta ekosistem mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di Kalimantan Timur yang berkarakter dengan olah bebaya menjunjung mutu



#### MISI

1. Mewujudkan pelaku pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat yang bermutu dan berkarakter
2. Meningkatkan tata kelola dan efektifitas birokrasi balai dan perlibatan publik
3. Mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Timur

### Rencana Kinerja Jangka Menengah:(Matriks Renstra 2022-2024)

Sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun. Dan dalam mencapai tujuan strategis yang tertuang dalam RENSTRA BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024, maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur merevisi Renstra 2020 – 2024. Revisi ini terjadi karena adanya perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dengan indikator dan target tahunan yang juga tentunya telah mengalami penyesuaian berdasarkan permendikbudristek nomor 13 tahun 2022. Adapun target kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang	1.1.Persentase satuan pendidikan (Paud Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya			0.98	1.96	3.92

	PAUD, Dikdas dan Dikmen	1.2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (dikdas dan dikmen)			25%	30%	35%
2	Terwujudnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik	2.1. Predikat SAKIP BPMP Kalimantan Timur	A	A	A	A	A
		2.2. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL	83	83	83	84	84

### Tujuan Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMP Provinsi Kalimantan Timur dan selaras dengan sasaran program dari Direktorat Jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen maka BPMP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan tujuan strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan Strategis dan Indikator Kinerja Program Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah dan BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

KODE	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN STRATEGIS
TS1	Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan Menengah	Persentase Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Kalimantan Timur yang meningkat mutunya
TS2	Memperkuat sistem tata Kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja Lembaga A

<b>TUJUAN STRATEGIS (TS1)</b>	<b>TUJUAN STRATEGIS (TS2)</b>
Meningkatkan mutu satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Memperkuat sistem tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



<b>SASARAN STRATEGIS (SS1)</b>	<b>SASARAN STRATEGIS (SS2)</b>
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Menguatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang baik

Dalam upaya mencapai sasaran strategis pertama (SS1) terwujudnya peningkatan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen, ditetapkan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

<b>KODE</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>
IKK 1.1	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya
IKK 1.2	Persentase Propinsi dan kabupaten/kota yang meningkat raport pendidikannya (dikdas dan dikmen)

Dalam upaya mencapai sasaran strategis kedua (SS.2) terwujudnya tata kelola BPMP Kalimantan Timur yang baik, ditetapkan indiaktor kinerja kegiatan sebagai berikut:

<b>KODE</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KEGIATAN</b>
IKK 2.1	Predikat Sakip BPMP Kalimantan Timur minimal "A"
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA- K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur

Adapun Keterkaitan keselarasan antara indikator kinerja sasaran strategis kementerian, indikator kinerja program ditjen paud dikdasmen dan indikator kinerja kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada tabel berikut:

Nomor SS/IKSS/IKK	Sasaran Strategis Kementerian
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang
IKSS 2.1	Nilai kualitas lingkungan belajar PAUD
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam assesmen kompetensi minimum <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Literasi</li> </ul>
	b. Numerasi
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang partisipasif,transparan dan akuntabel
SP	Terwujudnya tata kelola kemendikbudistek yang berkualitas
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek
IKP 5.4.2	Persentase satker di lingkungan Kemendikbudristek mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
IKP 5.4.4	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini,Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
SK	Menguatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen PAUD,Dikdas dan Dikmen
IKK 5.3.6.1	Persentase Satker di Ditjen PAUD,Dikdas dan Dikmen yang memiliki predikat SAKIP minimal A

IKK 5.4.4.1	Jumlah satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK /WBBM
<b>SK/SP/IKP/IKK</b>	<b>Sasaran Program PAUD</b>
SK	Meningkatnya capaian perkembangan PAUD yang berkualitas
SP	Meningkatnya nilai assesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK 2.2.1.1	Jumlah PAUD Penggerak
SK	Meningkatnya pembelajaran pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang berkualitas
IKK 2.2.1.5	Jumlah SLB Penggerak
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil assesment untuk praktik pembelajaran
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil
	dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
SK	Meningkatnya pembelajaran PAUD yang berkualitas
IKK 2.2.7.1	Persentase satuan PAUD yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran
IKK 2.2.7.2	Persentase satuan PAUD yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas
SK	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen
IKK 2.2.7.11	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.
IKK 2.2.7.12	Persentase Provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

## Perjanjian Kinerja Awal

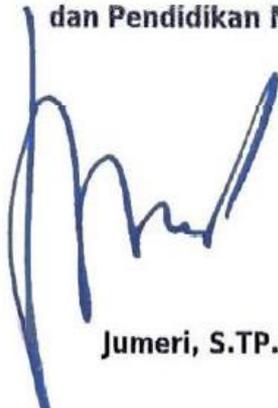
### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.274.587.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.892.074.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.166.661.000</b>

Samarinda, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

Perjanjian kinerja LPMP Kalimantan Timur ini juga mengalami revisi dua kali. Revisi pertama terjadi karena adanya perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP. Adapun ringkasan revisi Perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.274.587.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.892.074.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.166.661.000</b>

Samarinda, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

Total jumlah anggaran kegiatan peningkatan layanan penjaminan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal adalah Rp24.166.661.000 (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

### Perjanjian Kinerja Akhir

Revisi perjanjian kinerja kedua (perjanjian kinerja akhir) terjadi karena adanya revisi pagu anggaran yakni adanya penambahan target output fasilitasi dan pembinaan lembaga sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan anggaran. Adapun ringkasan revisi Perjanjian kinerja kedua (perjanjian kinerja akhir) BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 sebagai berikut:

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.939.905.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 18.707.900.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.647.805.000</b>

Samarinda, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,**



**Iwan Syahril**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, BPMP Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja. Upaya BPMP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penjaminan dan meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya dilakukan melalui kegiatan : pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi mutu pendidikan, monitoring dan evaluasi hasil pemetaan mutu pendidikan, dan fasilitasi satuan pendidikan sesuai delapan Standar Nasional Pendidikan dengan metode: pembinaan, penguatan, pembimbingan, dan pendampingan terhadap SDM pemerintah daerah dalam implementasi PMO (Program Manajemen Office) dan implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan serta terwujudnya tata kelola yang baik bagi satuan pendidikan. Oleh karena itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan maka setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing sasaran strategis yang tercantum dalam dokumen perjanjian kinerja sebagai berikut:

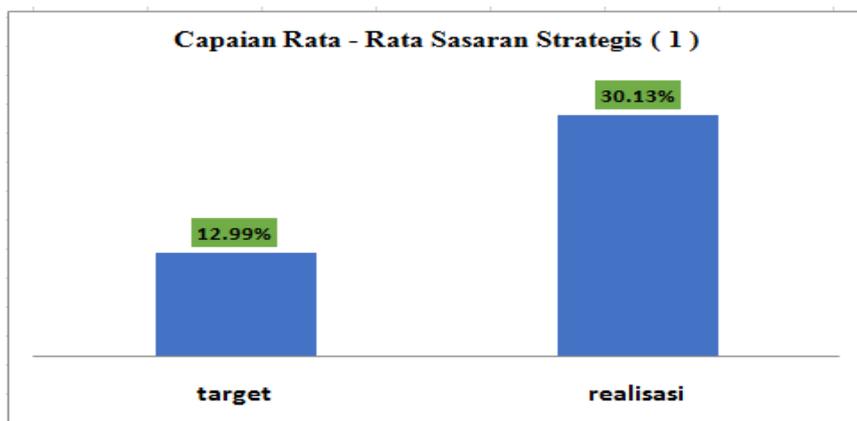
#### **1. Sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen**

Ketercapaian sasaran strategis “*meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen*” didukung melalui ketercapaian 2 indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang menngkat mutu pembelajarannya;
2. Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata pencapaian sasaran (outcome ) ke -1 pada sasaran strategis Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 adalah 30,13% persentase ini berada di atas dari target yang seharusnya yakni 12.99%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan proses penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan maka akan meningkat pula kinerja satuan pendidikan dan mutu pendidikan di propinsi Kalimantan Timur.

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-1 pada sasaran strategis Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen sebagai berikut:



Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan dan 4 indikator kinerja berdasarkan indikator yang terdapat dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Indikator kinerja **“Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pendidikannya”**, didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
  084. Verifikasi dan validasi Data Mutu Pendidikan
    - AA. Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik
    - AB. Sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik
    - AC. Pelaksanaan uji petik dapodik
    - AD. Pendampingan pengumpulan data DAPODIK
    - AF. Deseminasi pemanfaatan data DAPODIK
    - AG. Evaluasi tindak lanjut hasil kualitas data
2. Indikator kinerja **“Persentase Provinsi dan Kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)”**, didukung oleh Output/kegiatan sebagai berikut:
 

**6397.QDB.750. Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya** terdiri atas beberapa kegiatan:

  - AA. Rapat koordinasi teknis persiapan AN Tahun 2022
  - AB. Pelaksanaan pendampingan pemerintah daerah dalam penentuan status pelaksanaan AN di satuan pendidikan
  - AC. Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi AN  
Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih AN
  - AF. Monev pelaksanaan AN di satuan pendidikan
  - AH. Deseminasi PMP
  - BA. Sosialisasi PSP Angkatan 3
  - BD. Coaching klinik PSP Angk.3
  - BG. Bimtek Tim PMO PSP,PMO IKM dan Mitra Pembangunan
  - BH. Monev IKM ke satuan pendidikan
  - BJ. Pertemuan periodik PMO
  - BN. Sosialisasi PBD
  - BO. Bimtek platform rapor pendidikan (In 1)
  - BP. Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan Rencana aksi perbaikan (In 2)

- BR. Deseminasi PBD
- CC. Penyusunan Instrumen Implementasi Mitigasi Resiko PHBS, Numerasi, dan literasi
- CD. Monev Implementasi Mitigasi Resiko PHBS, Numerasi dan Literasi ke sekolah sekolah
- GB. Pendampingan pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan usulan DAK Fisik
- GC. Pendampingan implementasi DAK, Transfer Dana BOS, dan BOP Salur
- GD. Penyusunan Laporan dan Bahan Update Data Transaksional DAK
- GF. Persiapan monitoring DAK
- XA. Koordinasi dan publikasi Balai Penunjang PMP
- XB. Monev PPDB dan advokasi dengan Pemda Tahun 2022
- XC. Capacity Building PMP
- XD. Peningkatan Kompetensi Tim Tagana Penunjang PMP
- XX. Konsultan Peningkatan Pelayanan Umum
- ZA. Rakor Teknis Sinkronisasi Program dengan Pemda
- ZB. Monev keterlaksanaan PMO, Akun Belajar Id di sekolah Penggerak Angk.1
- ZC. Bimtek dan Pendampingan PBD dengan paradigma baru ke pemda melalui digitalisasi sekolah
- ZD. Bimtek dan Pendampingan, Pemanfaatan, Pengelolaan Platform SDS, Rapor Pendidikan, Merdeka Belajar dan TIK dalam Pembelajaran ke Sekolah Penggerak Angkatan dan 2 BA-BUN Tahap I.
- ZE. Penguatan program Merdeka Belajar bagi pengawas sekolah
- ZF. Forum pemangku Kepentingan Daerah PSP
- ZG. Penjaringan Komitmen Pemda PSP Angkatan 3
- ZH. Pendampingan pleno Pemingkatan dan Berita Acara PSP Angkatan 3 dengan Pemda
- ZI. Penguatan peran UPT Kemdikbud dalam pendampingan IKM
- ZJ. Rakor IKM dengan Pemda dan Mitra Pembangunan
- ZK. Capacity Building PMP

Adapun hasil capaian indikator kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang mendukung sasaran strategis (1) di atas sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur dengan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2022 sebagai berikut :

### **1.1. Persentase Satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya**



Gambar. Monev Program Sekolah Penggerak jenjang PAUD Kab. Penajam Paser Utara (wawancara dengan pengawas Pembina dan kepek TK Handayani kab. PPU)

### Definisi :

Persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi di bandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.

**Metode Perhitungan (1):** —→ Berdasarkan hasil assesmen nasional

**Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan**

**Atau survey lingkungan belajar meningkat**

**x 100%**

**Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan**

**Metode Perhitungan (2):** —→ Berdasarkan hasil akreditasi sekolah

$$\frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{\text{total sekolah TA 2022}} - \frac{(0,5 \times A_{21}) + (0,35 \times B_{21}) + (0,15 \times C_{21})}{\text{total sekolah TA 2021}}$$

**Keterangan :**

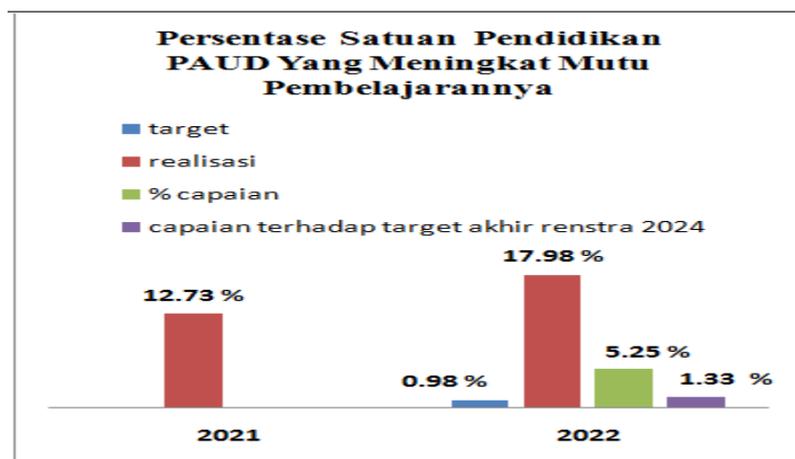
1.  $\Delta$  : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi
2.  $A_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022
3.  $B_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022
4.  $C_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022
5.  $A_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021
6.  $B_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021
7.  $C_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021

Pada tahun 2022 Indikator 1.1 merupakan indikator yang baru muncul di BPMP dan pada tahun 2021 indikator ini belum ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPMP. Hal ini disebabkan karena pada pertengahan tahun 2022, terjadi perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dan telah terjadi pergeseran kewenangan yang mana jenjang PAUD sebelumnya menjadi kewenangan UPT BP PAUD berubah menjadi kewenangan BPMP. Perubahan nomenklatur ini menyebabkan terjadi pula cut oof anggaran sehingga realisasi dari indikator peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD tahun 2022 belum dapat diukur ketercapaiannya oleh BPMP. Ketercapaian Indikator ini diperoleh hasilnya dari pusat yakni dari BAN PAUD dan BAN S/M melalui Ditjen PAUD Dikdasmen, dengan mengacu pada data hasil akreditasi sekolah, karena hasil assesmen nasional belum dapat diakses dan belum ada hasilnya diperoleh dari Badan Standar Kurikulum dan Assesmen Pendidikan (BSKAP). Mutu pembelajaran satuan pendidikan di samping dapat diukur

melalui hasil assesmen nasional juga dapat diukur dari hasil akreditasi sekolah, karena dalam sistem penilaian akreditasi sekolah juga berdasar pada indikator yang mengacu pada 8 SNP. Sehingga dalam pengukuran indikator kinerja 1.1 ini menggunakan metode perhitungan (2) yakni berdasarkan hasil penilaian akreditasi sekolah. Adapun hasil mutu pembelajaran PAUD berdasarkan hasil akreditasi satuan pendidikan sebagai berikut:

Realisasi (%) 2021	Tahun 2022			Target Renstra 2022	Capaian Terhadap target akhir Renstra 2024
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
12.73	0.98 %	17.98%	5.25 %	0.98 %	1.33 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021 hasil mutu pembelajaran PAUD yang bersumber dari data akreditasi sekolah diperoleh capaian sebesar 12.73% sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 17.98%. Jadi persentase peningkatan mutu pembelajaran PAUD di Propinsi Kalimantan Timur diperoleh capaian 5.25%. Capaian ini berada di atas dari target yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa dengan proses penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 SNP yang diterapkan di satuan pendidikan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan PAUD. Jika capaian ini diperbandingkan dengan target akhir renstra 2024 diperoleh peningkatan hasil sebesar 1.33 %. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni 3.92 %. Adapun grafik capaian dari indikator ini sebagai berikut:



Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja 1.1 yang ada pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2022 strategi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian target kinerja adalah memberikan advokasi kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten/kota dalam mengawal program pemerintah daerah, program sekolah sebagai usaha peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan membangun apa yang perlu diubah, menciptakan perubahan positif, mengambil tindakan dan menginvestasikan sumber daya yang ada.

**1.2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)**



Gambar. Pelaksanaan Assesment nasional (ANBK) jenjang dikdas dan dikmen tahun 2022

**Definisi :**

Persentase dari propinsi/kabupaten/kota di wilayah masing – masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

**Metode Perhitungan:(1) → (Assesmen Nasional)**

$$\frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen Yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

**Metode Perhitungan: (2) → ( Akreditasi sekolah)**

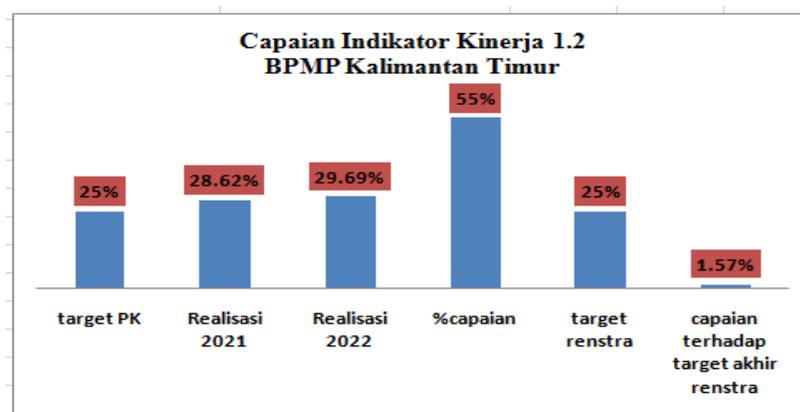
$$= \sum_{i=1}^n \text{flag}(\Delta_i)$$

- Keterangan :
- 1.  $i$  : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan
  - 2.  $\text{flag}(\Delta_i)$  : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

Ketercapaian indikator 1.2 ini, diperoleh dari hasil akreditasi sekolah karena peningkatan rapor pendidikan dan mutu pendidikan disamping dapat diukur melalui assesmen nasional juga dapat diperoleh dari hasil akreditasi sekolah. Hasil peningkatan mutu pendidikan/peningkatan rapor pendidikan ini diperoleh dari pusat yakni dari BAN melalui Ditjen Paud Dikdasmen. Adapun hasil dari peningkatan rapor pendidikan yang bersumber dari data akreditasi sekolah sebagai berikut:

Realisasi (%) 2021	Tahun 2022			Target Renstra 2022	Capaian Terhadap target akhir Renstra 2024
	Target PK (%)	Realisasi (%)	% Capaian		
28.62 %	25 %	29.69%	55 %	25%	1.57 %

Berdasarkan data di atas, target kinerja indikator kinerja 1.2 tahun 2022 adalah 25% dimana pada tahun 2021 terealisasi 28.62% sedangkan pada tahun 2022 ini terealisasi 29.69%. Persentase capaian kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya adalah sebesar 55%, persentase ini diperoleh dari adanya 5 kabupaten/kota dan 1 propinsi yang mengalami peningkatan hasil akreditasi sekolah dari tahun 2021 dan tahun 2022. Sedangkan capaian terhadap target akhir renstra mengalami kenaikan sebesar 1.57%. Capaian tersebut lebih tinggi dari target yang seharusnya dapat dicapai di tahun 2024 yakni 35%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan dapat diukur dengan adanya kenaikan nilai akreditasi satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota karena penilaian akreditasi dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dengan DAPODIK, EMIS, PMP atau sistem lain yang tersedia yang sesuai dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. Disamping itu penilaian akreditasi adalah merupakan penilaian proses pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan.



Untuk mencapai kedua indikator kinerja di atas, banyak hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target indikator kinerja antara lain:

1. terjadi perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP dan telah terjadi pergeseran kewenangan yang mana jenjang PAUD sebelumnya menjadi kewenangan UPT BP

PAUD berubah menjadi kewenangan BPMP, Hal ini menyebabkan hasil capaian indikator ini belum dapat diakses melalui sistem aplikasi rapor pendidikan.

2. Sistem informasi capaian rapor pendidikan satuan pendidikan dan rapor pendidikan kabupaten/kota tidak dapat diakses oleh BPMP, sehingga BPMP mengalami kesulitan dalam melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dan advokasi ke kabupaten/kota.
3. Hasil assessmen nasional tahun 2022 belum dapat diakses, sehingga indikator kinerja sulit diukur ketercapaiannya karena belum ada angka pembandingnya.

Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam menangani hambatan dan permasalahan di atas adalah:

1. Koordinasi secara eksternal dengan pusat yakni bagian evaluasi Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen, untuk mendapatkan data hasil mutu pembelajaran PAUD dan persentase kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya dari Badan Akreditasi Nasional.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan ANBK dan pelaksanaan Perencanaan berbasis data di satuan pendidikan serta melakukan advokasi kepada pemerintah daerah/dinas kabupaten/kota dalam upaya peningkatan rapor pendidikan satuan pendidikan, kabupaten kota dan propinsi.
3. Cara yang ditempuh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam menangani indikator kinerja yang sulit diukur adalah berkoordinasi dengan pusat yakni BAN Paud dan BAN S/M melalui Ditjen PAUD Dikdasmen untuk mendapatkan capaian indikator 1.1 dan 1.2

Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja 1.1 dan 1.2 yang ada pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2022, strategi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian target kinerja adalah memberikan advokasi kepada pemerintah daerah, dinas pendidikan kabupaten/kota dalam mengawal program pemerintah daerah, program sekolah sebagai usaha peningkatan mutu pendidikan dengan tujuan membangun apa yang perlu diubah, menciptakan perubahan positif, mengambil tindakan dan menginvestasikan sumber daya yang ada.

## **2. Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola LPMP yang Baik**

Ketercapaian sasaran strategis “*Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur*” didukung melalui ketercapaian 2 indikator kinerja, yaitu:

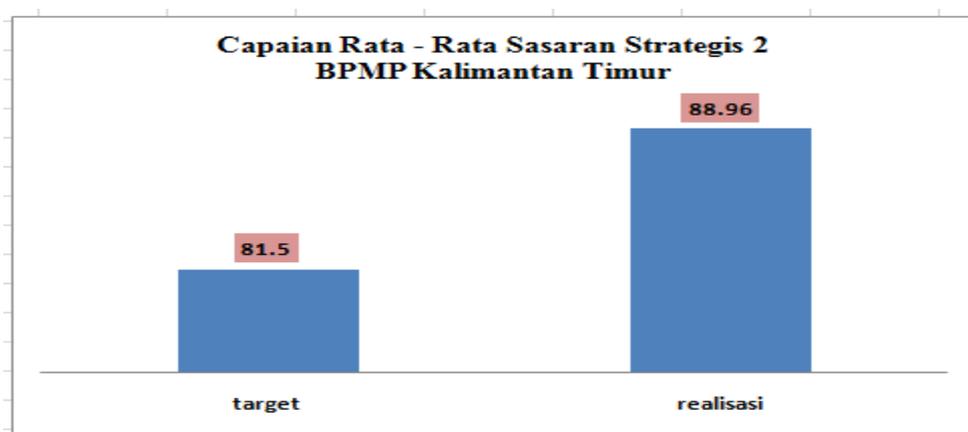
1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur
2. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL

Ketercapaian sasaran kegiatan terkait tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan adanya peningkatan nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi sebanyak 5 tahun berturut turut sampai tahun 2022 ini. Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Timur akan senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja,

dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja sebagai prioritas utama.

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata pencapaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 adalah 88.96. Capaian ini berada di atas dari target yang seharusnya yakni 81.5. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan proses penjaminan mutu internal di BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang berorientasi pada hasil maka akan meningkat pula capaian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini juga terbukti dengan semakin meningkatnya nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun.

Adapun grafik perbandingan capaian sasaran (outcome) ke-2 pada sasaran strategis Meningkatkan tata kelola BPMP Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:



Ketercapaian ke-2 indikator kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 yang mendukung tercapainya sasaran strategis ini dikarenakan adanya dukungan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

- 2.1. Indikator kinerja “**Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur**”. Didukung oleh kegiatan sebagai berikut:
  - 2005.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal
  - 2005.EBA.962. Layanan Umum
  - 055. Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan
    - A. Pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan
    - B. Pengelolaan kepegawaian
    - C. Perencanaan program dan anggaran, penyusunan laporan keuangan, SAKIP
    - D. Pelaksanaan manajemen WBK
    - E. Penilaian angka kredit IVB ke atas bagi guru
    - F. Unit Layanan Terpadu Keliling
    - G. Pengelolaan arsiparis
- 2.2. Indikator kinerja “**Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur**”, didukung oleh

Output/kegiatan sebagai berikut:

2005.EBA.994. Layanan perkantoran

001. Gaji dan tunjangan

A. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

002. Operasional dan pemeliharaan kantor

A. Kebutuhan sehari-hari perkantoran

B. Langganan Daya dan Jasa

C. Pemeliharaan Perkantoran

D. Penggantian barang inventaris

E. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional perkantoran

2005.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

2005.EBB.951. Layanan Sarana Internal

997. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

A. Pengadaan Peralatan dan Mesin

Adapun tingkat ketercapaian masing-masing indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

## 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur

### Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal ((RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 299 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

### Metode Perhitungan:

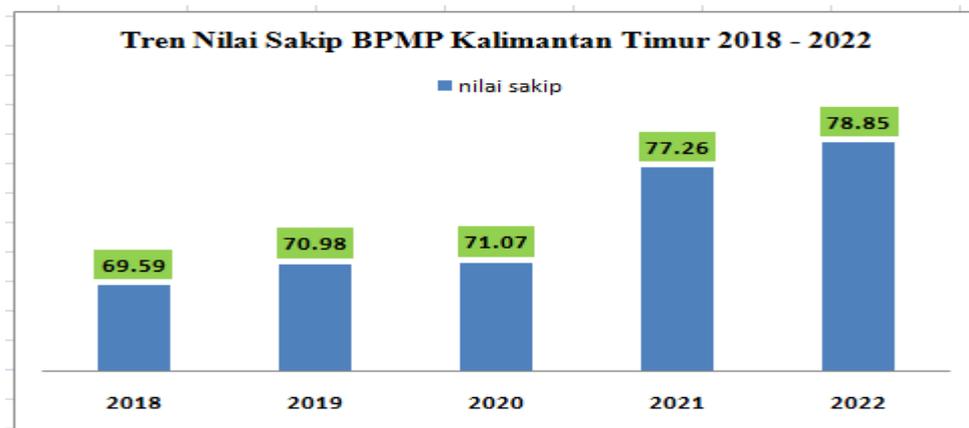
Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Nilai SAKIP = (Perencanaan Kinerja) + (Pengukuran Kinerja) + (Pelaporan Kinerja) + (Evaluasi Kinerja)**

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP

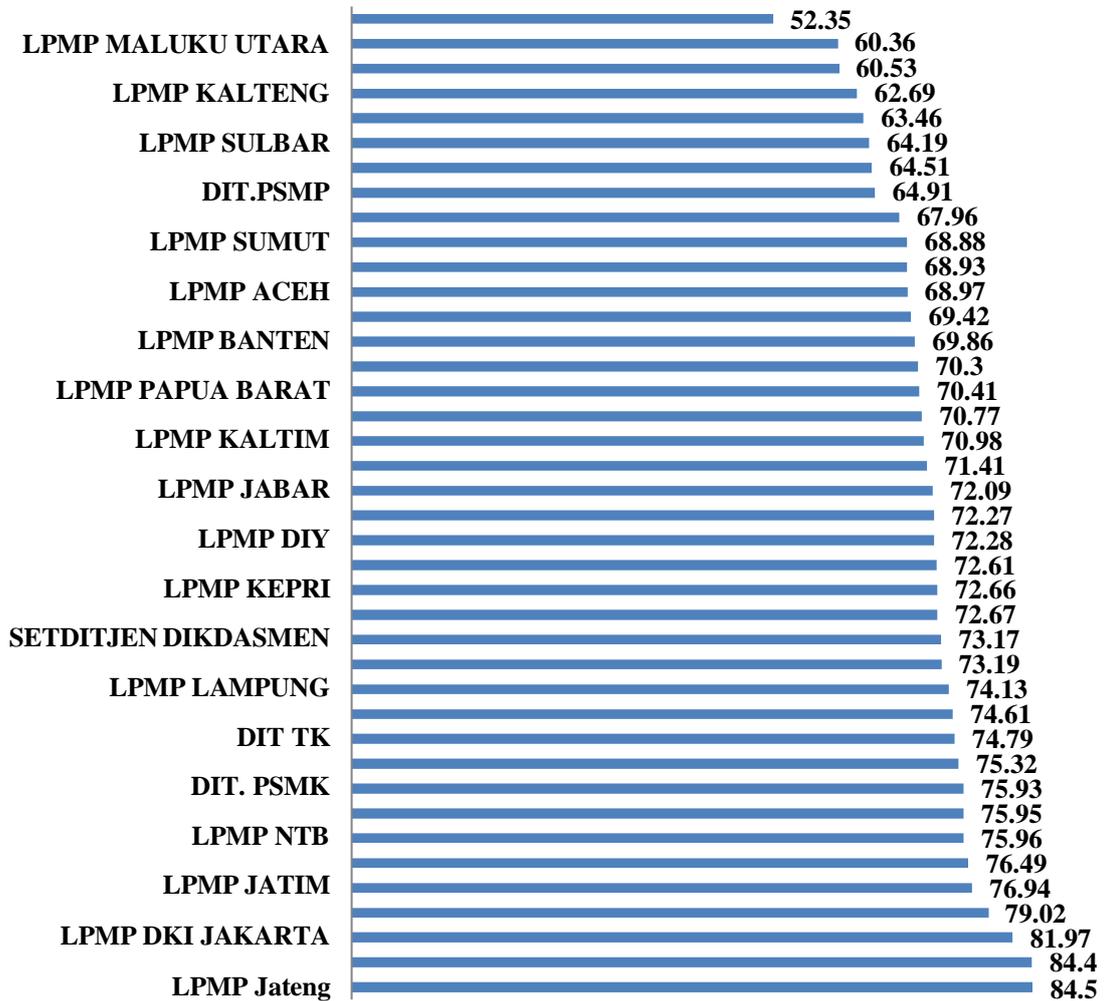
Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 - 50	C	Kurang
0 - 30	D	Sangat Kurang

Pengukuran indikator kinerja ini dapat dilihat dari nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur. SAKIP ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran yang beroorientasi pada hasil. Oleh karena itu SAKIP ini perlu dievaluasi setiap tahun atas pelaksanaan program untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 difokuskan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yaitu anggaran digunakan secara efektif untuk sektor dan program yang berdampak pada sasaran prioritas, seperti pemulihan ekonomi, refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat. Adapun nilai SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2018, 2019 dan 2020 dan 2021, 2022 sebagai berikut :

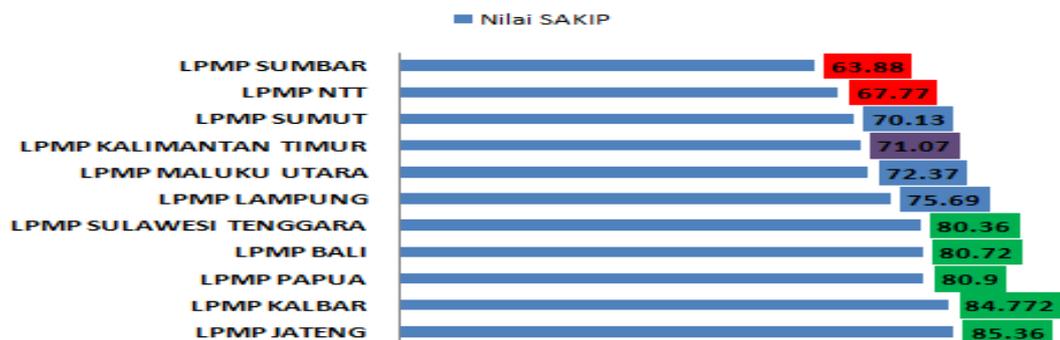


Berikut ini disajikan perbandingan capaian nilai SAKIP BPMP di seluruh propinsi dari tahun 2019 dan tahun 2020 ,2022:

**Grafik Nilai SAKIP 2019  
Satker/UPT Ling.Ditjen Dikdasmen**

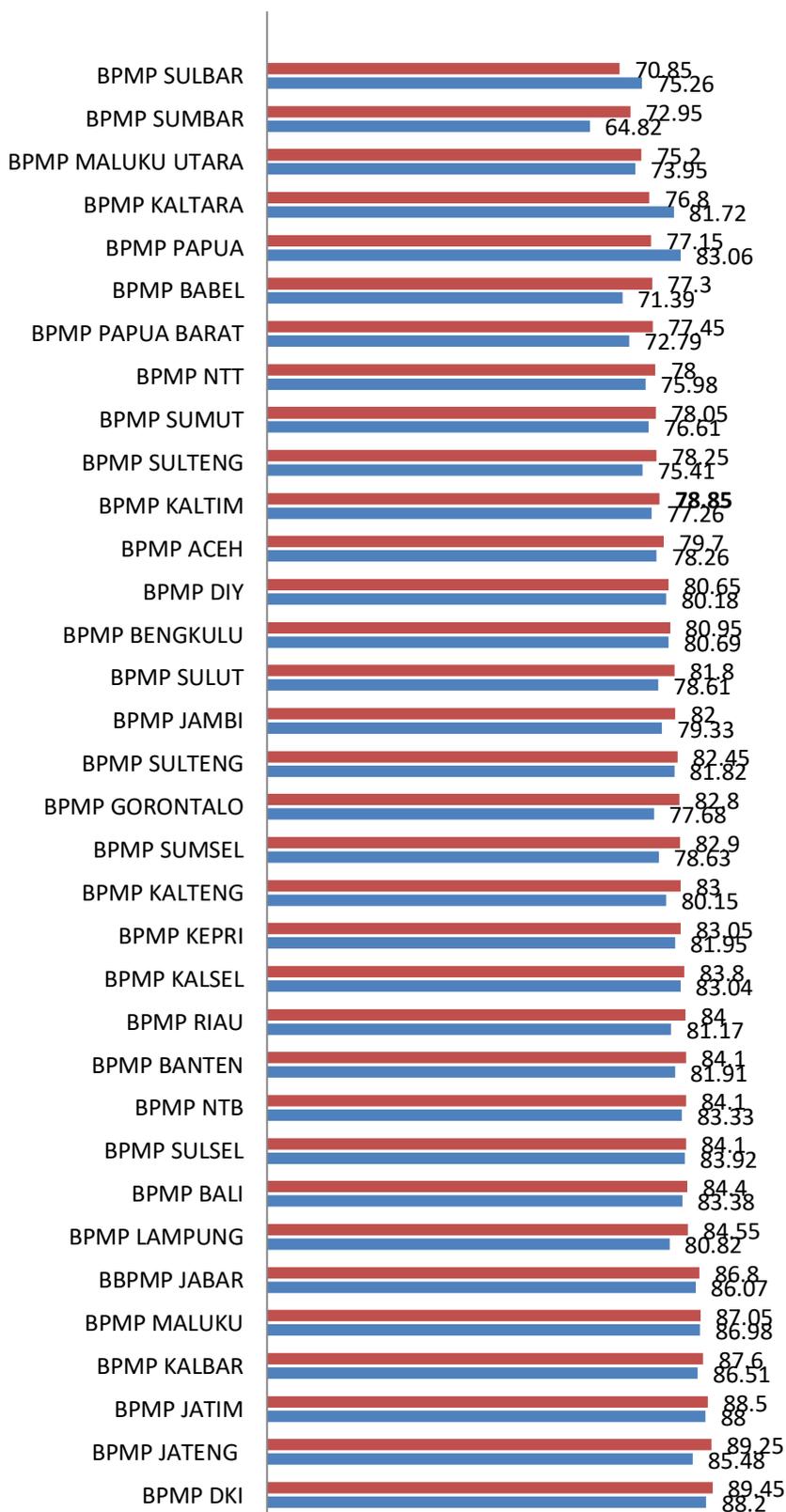


**NILAI SAKIP LPMP TAHUN 2020**



## LHE SAKIP DITJEN PAUD,DIKDASMEN 2021 - 2022

■ nilai sakip TAHUN 2022    ■ nilai sakip TAHUN 2021



## 2.2. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKAKL

### Definisi:

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

### Metode Perhitungan:

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

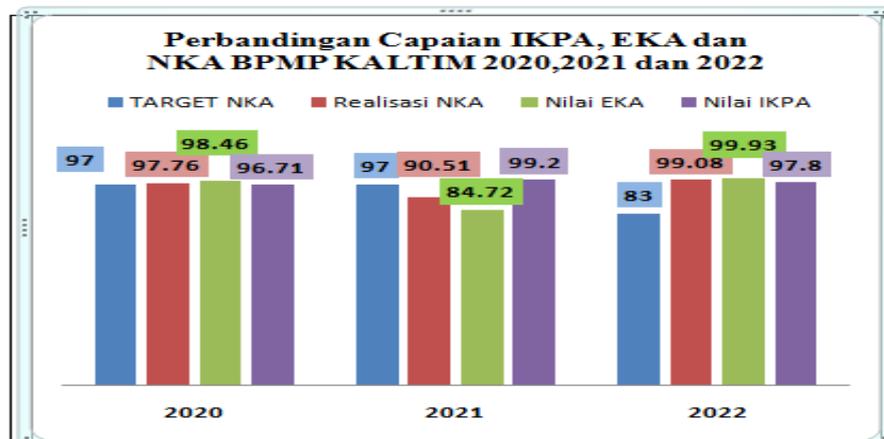
Nilai IKPA diambil diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Tabel. Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2020 dan 2021, 2022

Tahun	Target Nilai Kinerja	Nilai EKA	Nilai IKPA	Total Nilai Kinerja	Kategori
1	2	3	4	5	6
2020	97	98.46	96.71	97.76	Sangat Baik
2021	97	84.72	99.2	90.51	Sangat Baik
2022	83	99.93	97.80	99.08	Sangat Baik

Sumber:Aplikasi Spasikita(simproka) per tanggal 10 Januari 2023

Adapun grafik Perbandingan realisasi nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL tahun 2020 dan 2021, 2022 sebagai berikut:



Berikut capaian NKA Seluruh BPMP/BBPMP tahun 2022 :

NO	NAMA SATKER	NILAI EKA	NILAI IKPA	NILAI KINERJA	RANK 2021	NO	NAMA SATKER	NILAI EKA	NILAI IKPA	NILAI KINERJA	RANK 2021
1	2	3	4	$5=(3*60\%)+(4*40\%)$	6	1	2	3	4	$5=(3*60\%)+(4*40\%)$	6
1	GORONTALO	99,95	99,85	99,91	1	18	KEP. BANGKA BELITUNG	99,61	95,80	98,09	10
2	NUSA TENGGARA BARAT	99,90	98,88	99,49	7	19	JAWA TENGAH	99,85	95,43	98,08	5
3	KALIMANTAN TIMUR	99,93	97,80	99,08	24	20	JAMBI	99,64	95,58	98,02	17
4	BALI	99,82	97,93	99,06	8	21	LAMPUNG	99,38	95,50	97,83	30
5	KEPULAUAN RIAU	99,95	97,36	98,91	12	22	PAPUA	98,18	97,09	97,74	9
6	JAWA TIMUR	99,77	97,50	98,86	3	23	SUMATERA UTARA	98,83	95,92	97,67	16
7	SULAWESI UTARA	99,93	97,04	98,77	28	24	SUMATERA SELATAN	99,37	94,80	97,54	34
8	KALIMANTAN TENGAH	99,88	96,98	98,72	23	25	BENGKULU	99,62	94,35	97,51	26
9	MALUKU	99,66	97,14	98,66	4	26	PAPUA BARAT	99,78	93,88	97,42	29
10	D.K.I. JAKARTA	99,89	96,81	98,66	11	27	ACEH	99,65	94,00	97,39	19
11	MALUKU UTARA	99,87	96,67	98,59	20	28	SULAWESI BARAT	99,61	93,40	97,13	27
12	BANTEN	99,90	96,45	98,52	18	29	JAWA BARAT	99,93	92,18	96,83	2
13	KALIMANTAN SELATAN	99,83	96,15	98,36	21	30	NUSA TENGGARA TIMUR	99,46	92,77	96,78	14
14	RIAU	99,90	95,99	98,34	13	31	SULAWESI SELATAN	99,78	91,61	96,51	32
15	KALIMANTAN BARAT	99,84	95,99	98,30	6	32	SUMATERA BARAT	98,28	92,20	95,85	25
16	SULAWESI TENGGARA	99,85	95,63	98,16	22	33	KALIMANTAN UTARA	93,34	95,50	94,20	31
17	SULAWESI TENGAH	99,79	95,61	98,12	15	34	D.I. YOGYAKARTA	99,56	85,73	94,03	39

Dalam melaksanakan program tahunan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, proses pelaksanaannya dilakukan evaluasi yang terpantau dalam sebuah sistem aplikasi yang saling terintegrasi. Aplikasi tersebut secara terpusat dan dikembangkan oleh biro perencanaan kemendikbudristek yang dikenal dengan aplikasi Spasikita. Aplikasi Spasikita sebagai media dalam melakukan pemantauan, penginputan dan evaluasi proses pelaksanaan program dan evaluasi hasil pelaksanaan program baik realisasi secara fisik maupun realisasi keuangan. Berdasarkan aplikasi Spasikita, nilai kinerja anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur Pada tahun 2022 mencapai hasil di atas dari target yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja yakni 99.08. Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, dimana pada tahun 2022 ini BPMP Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat 3 dari seluruh BPMP yang ada di bawah Dirjen PAUD Dikdasmen. Hal ini disebabkan karena terjalinnya hubungan komunikasi secara intens dalam proses pelaksanaan anggaran baik secara internal maupun secara eksternal sehingga permasalahan dalam proses perealisasi kegiatan dan anggaran mendapatkan solusi terbaik. Adapun prestasi lainnya yang pernah diraih pada tahun sebelumnya adalah

## PRESTASI

1. Satuan Kerja dengan Transaksi Terbesar Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2020
2. Satuan Kerja Pengelola Belanja Modal Pagu Besar Terbaik T.A 2020
3. Peringkat Kedua IKPA Terbaik Kategori Satker Besar Tahun 2020
4. Unit Layanan Terpadu di Unit Pelaksana Teknis Daerah dengan Prediksi "Baik dengan Catatan" Tahun 2020
5. Satuan Kerja Dengan Kinerja Terbaik dalam Kategori Penyampaian Kontrak Tahun 2020
6. Peringkat Tiga Satuan Kerja dengan Prestasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun 2018 dengan nilai sebesar 98,96



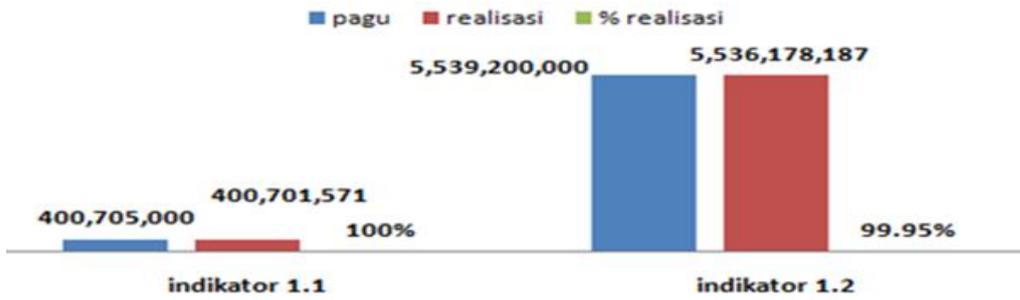
Dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja 2.1 dan 2.2 yang ada pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2022, strategi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian target kinerja adalah akan senantiasa berusaha untuk menjalankan setiap program sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam reformasi birokrasi, yakni reformasi yang berkaitan dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), anggaran berbasis kinerja, organisasi (Kelembagaan) berbasis kinerja, dan sistem sumber daya aparatur yang berorientasi pada kinerja sebagai prioritas utama.

## B. REALISASI ANGGARAN

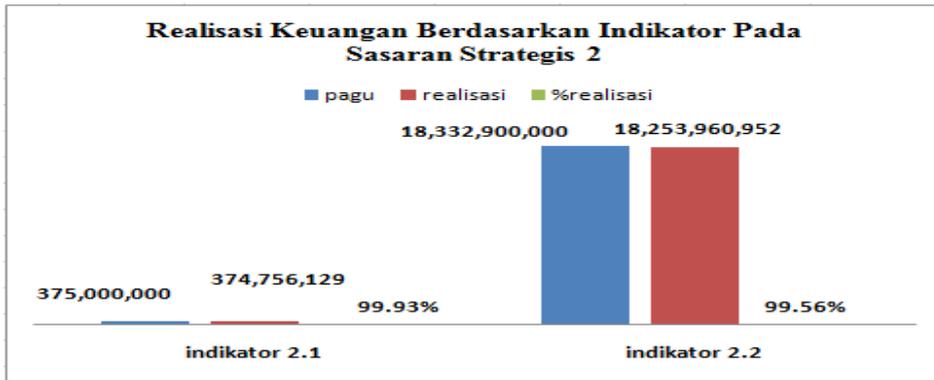
### 1. Capaian Anggaran

Berdasarkan revisi terakhir Pagu Anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp24.647.805.000,- (Dua Puluh Empat milyar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh juta Delapan Ratus Lima ribu rupiah). Pagu awal anggaran pada saat perjanjian kinerja adalah Rp24.166.661.000,- ( Dua Puluh Empat Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah). Pagu anggaran ini mengalami revisi (terjadi penambahan anggaran) sebesar Rp481.144.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat ribu rupiah) oleh pusat karena adanya penambahan target output Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga. Dari pagu anggaran revisi terakhir tersebut berhasil direalisasikan sebesar 24.565.596.839 dengan persentase daya serap sebesar 99.67%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

**Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Pada Sasaran Strategis 1**



**Realisasi Keuangan Berdasarkan Indikator Pada Sasaran Strategis 2**



Sedangkan total capaian realisasi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022 sebagai berikut:



Capaian Total Realisasi Anggaran 2022 BPMP Provinsi Kalimantan Timur

Grafik persentase perbandingan realisasi anggaran BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut;



*Output* Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, terdiri atas 2 indikator kinerja (persentase satuan pendidikan PAUD, Dikmas yang meningkat mutu pembelajarannya dan persentase provinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen), pada tahun 2022, terealisasi sebesar Rp5.936.879.758,- dengan persentase capaian sebesar 99.94 % dari jumlah pagu Rp5.939.905.000,- dengan rincian indikator 1.1 terealisasi sebesar Rp400.701.571 dengan persentase 100% sedangkan untuk 1.2 terealisasi sebesar Rp5.536.178.187 dengan persentase 99.95%.

Sedangkan sasaran strategis Meningkatnya tatakelola BPMP, didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu: Indikator Kinerja Nilai minimal SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur (indikator 2.1) dan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL (indikator 2.2).

*Output* ini didukung oleh 2 indikator kinerja kegiatan yaitu :

*Output* layanan perkantoran, dan layanan umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp18.707.900.000,- yang terealisasi sebesar Rp18.628.717.081,- atau 99.57 %, dengan rincian indikator 2.1 terealisasi sebesar Rp Rp374.756.129 dengan persentase 99.93% sedangkan untuk 2.2 terealisasi sebesar Rp18.253.960.952 dengan persentase 99.56%.

## 2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp4.929.561.000. dan efisiensi sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 berhasil melakukan penghematan anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran dimana BPMP Provinsi KALTIM telah merealisasikan capaian fisik melebihi dari target output dengan anggaran yang terbatas dapat melakukan berbagai kegiatan dan menambah realisasi output baik secara daring maupun luring. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari belanja barang, yang meliputi :

- a. optimalisasi kegiatan perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, belanja bahan, belanja operasional non operasional lainnya.
- b. Perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari luring menjadi daring

Refocusing anggaran juga dilakukan dengan memindah alokasi anggaran untuk kegiatan kegiatan yang prioritas seperti BA-BUN, dan IKM. Anggaran hasil efisiensi digunakan juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas yakni kegiatan Perencanaan Berbasis Data di seluruh sekolah baik dalam bentuk daring maupun dalam bentuk luring dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Efektivitas penganggaran ini berdasar pada 3 prinsip yakni prinsip ekonomis, efektif dan efisien.

Perhitungan nilai efisiensi RO satuan kerja tersebut menggunakan metode perhitungan sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left( 1 - \frac{\text{RAK ke } i / \text{RVK ke } i}{\text{PAK ke } i / \text{TVK ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Sumber : Permenkeu RI No.249/PNK.02/2011

## C. Penghargaan dan Program Crusscutting/collaborative

### 1. Penghargaan

Pada tahun 2019, dan tahun 2020 BPMP Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan penghargaan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL 2019 baik dalam kinerja proses (IKPA) dan kinerja akhir (EKA). Adapun jenis penghargaan yang telah diraih dalam hal pelaksanaan kinerja anggaran sebagai berikut:



### 2. Program crosscutting/collaborative

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur melakukan program *crosscutting /collaborative* dengan mitra pembangunan dan dengan dinas pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur terutama terkait Implementasi Kurikulum Merdeka. Kegiatan ini sebagai wujud strategi pelibatan elemen masyarakat sebagai mitra pembangunan Pendidikan. Mitra Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerjasama dengan BPMP Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- a. Tanoto Foundation
- b. PT.Waru Plantation
- c. PT. Sukses Tani Nusa Subur

- d. Yayasan Gugah Nurani Indonesia
- e. PT.Kaltim Nitrat Indonesia
- f. Yayasan Agungan guru
- g. PT.Penerbit Erlangga

Implementasi Kurikulum Merdeka ini sangat berpengaruh signifikan terhadap program karena adanya penghematan anggaran di mana pada masa pandemi dan pasca pandemi covid ini guru guru dapat meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran hanya dengan mengakses platform merdeka mengajar.



Gambar.Penandatanganan komitmen bersama dengan pemerintah daerah dan Mitra pembangunan local dalam implementasi Kurikulum Merdeka

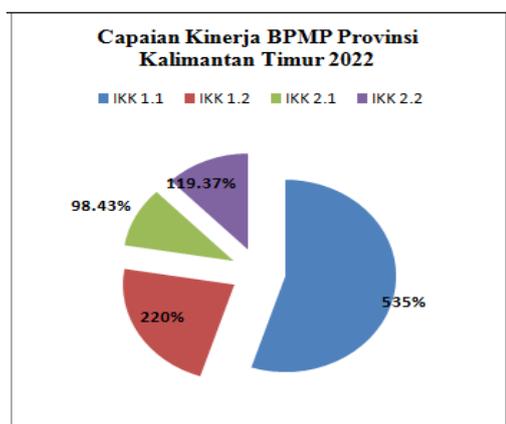
## BAB IV

### PENUTUP

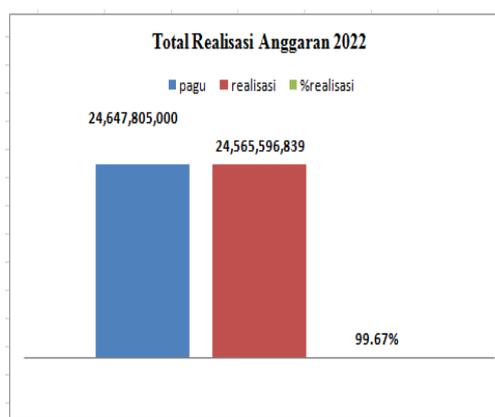
#### A. Kesimpulan

Selama tahun 2022 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

#### Capaian Kinerja IKK



#### Kinerja Keuangan



Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya lebih dari 100% Dari 4 indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2022. Meskipun masih terdapat 1 indikator kinerja yang belum memenuhi dari target kinerja namun secara keseluruhan capaian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp24.565.596.839,- atau 99.67% dari total pagu sebesar Rp24.647.805.000,-

Dari hasil evaluasi kinerja, hambatan dalam pencapaian target dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya reorganisasi kemendikbudristek yakni terjadinya perubahan nomenklatur LPMP menjadi BPMP, dan terjadinya perubahan kewenangan jenjang PAUD yang sebelumnya di bawah BP Paud menjadi kewenangan BPMP. Perubahan ini berpengaruh terhadap terjadinya perubahan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja hal ini menyebabkan hasil capaian indikator 1.1 dan 1.2 belum dapat diakses oleh BPMP.
2. terbatasnya SDM SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur.

Langkah antisipasi untuk menanggulangi kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dengan pusat sehingga hasil dari pencapaian target kinerja indikator 1.1 dan 1.2 dapat diperoleh hasil capaiannya dari BAN Pusat melalui Ditjen PAUD Dikdasmen dengan menggunakan data akreditasi sekolah.
2. menambah SDM SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur, dan menindaklanjuti

rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan implementasi SAKIP, serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program dan anggaran dalam bentuk evaluasi program dan pemantauan realisasi anggaran atas capaian program untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja yang diperjanjikan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Pemanfaatan perjanjian kinerja dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan penyusunan indikator kinerja individu masing – masing pegawai.
2. Menjalinkan komunikasi intens dan bekerjasama serta bersinergi dengan para *stakeholder* di seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan rapat bulanan Program Manajemen Office (PMO) dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
3. Peningkatan kualitas SDM SAKIP melalui pelatihan sakip bekerjasama dengan Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek dan melakukan evaluasi terhadap lembar hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.

# **LAMPIRAN**

**PENGUKURAN KINERJA LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2022**

Uraian Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	2022			Target renstra 2022	% Capaian terhadap renstra 2022
				Target	Realisasi	% Pencapaian		
1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD Dikdas dan Dikmen	1.1	<b>Persentase satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkatkan mutu pembelajarannya</b>	INDIKATOR INI BARU DITETAPKAN PADA TAHUN 2022	0.98%	17.98 %	5.25 %	0.98 %	1.33 %
	1.2	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkatkan rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	<b>Dikdas</b> 75.82 (kurang) 37.77(sedang) 5.88(baik)  <b>Dikmen</b> 68.38(kurang) 35.48(sedang) 11.93(baik)	25 %	29.69 %	55 %	25 %	1.57%
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Timur	77.26 (BB)	A	78.85 (BB)	98.43%	A	A
	2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL BPMP Kalimantan Timur	93.30 %	83	99.09	119.37%	83	84

**Capaian Kinerja Sasaran (Output) BPMP Provinsi Kalimantan Timur 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Targ et Kinerja 2021	Anggaran	Realisasi 2021	REALISASI 2022				Targ et Rens tra 2022
					KINE RJA OUT PUT	%	Anggaran	%	
1. Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen	1.1	<b>Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat pembelajarannya</b>		INDIKATOR INI BARU DITETAPKAN PADA TAHUN 2022			SEBAGIAN BESAR ANGGARAN MASIH DIBAWAH BP PAUD KARENA REORGANISASI BARU TERJADI PADA PERTENGAHAN TAHUN 2022 (Rp400.701.571)	100 %	0.98
	1.2	<b>Persentase propinsi dan kab/kota yang meningkat rapor pendidikannya ((dikdas dan dikmen)</b>	3.192.243.000	3.102.620.503	28.62%	29.69% (55%)	5.536.178.187	99.95%	25
2. Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	2.1	<b>Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur</b>	1.571.484.000	1.467.168.031	77.26	78,85(BB)	374.756.129	99.93%	A
	2.2	<b>Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKAKL BPMP Kaltim</b>	9.491.095.000	9.335.990.187	92.85	99.08	18.253.960.952	99.56%	83

**Perjanjian Kinerja Awal (1)**



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

**Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Timur**

**Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

**Target Kinerja**

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.274.587.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.892.074.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.166.661.000</b>

Samarinda, 28 Maret 2022

## Perjanjian Kinerja Revisi (1)



### Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur Dengan

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**

**Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda,14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan  
Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**



**Dr.Khairullah, S.Pd,M.Pd**

#### Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 19.274.587.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 4.892.074.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.166.661.000</b>

Samarinda, 14 Juli 2022

**Pt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur**



**Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

## Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur  
Dengan**

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,**



**Iwan Syahril**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**

**Target Kinerja**

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Timur	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.939.905.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 18.707.900.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 24.647.805.000</b>

Samarinda, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur,**



**Iwan Syahril**



**Dr. Khairullah, S.Pd, M.Pd**



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Kalimantan Timur, 27  
Agustus 2022

Ketua Tim Reviu



Abdusodik Zunaidi, SSi, MM

196907052002121003